



## APBD Perubahan Dikebut

# Dana Tak Terduga Naik Rp 7,1 M

Semula anggaran belanja tidak terduga hanya Rp 2,25 miliar pada APBD Induk 2017. Namun pada APBD Perubahan 2017, diajukan Rp 9,94 miliar atau naik Rp 7,1 miliar.

SINGARAJA, NusaBali

Pembahasan APBD Perubahan yang sempat molor mulai dikebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng dengan Badan Anggaran (Bangar) DPRD Buleleng. APBD Perubahan ditarget sudah ketuk palu akhir September. Pembahasan Kamis (7/9) siang diawali dengan mengupas proyeksi sumber pendapatan dan pembiayaan daerah.

Dalam pembahasan itu terungkap alokasi dana tak terduga bertambah signifikan, dengan sisa waktu yang ada hingga Desember 2017. TAPD memasang dana tak terduga sebesar Rp 7,1 miliar untuk tiga bulan ke depan (Oktober-Desember). Dana tak terduga ini naik tiga kali lipat dibanding jumlah yang dipasang pada APBD Induk 2017.

Semula anggaran belanja tidak terduga hanya dipasang Rp 2,25 miliar pada APBD Induk 2017. Namun pada APBD Perubahan 2017, TAPD mengajukan anggaran Rp 9,94 miliar atau naik Rp 7,1 miliar. Kenaikan yang signifikan itu pun sempat mendapat sorotan dari Badan Anggaran DPRD Buleleng. Anggota Banggar, Putu Tirta Adnyana mengaku heran dengan kenaikan yang signifikan itu. "Kami mohon penjelasan dari eksekutif. Kenapa kenaikannya bisa tinggi sekali," kata politisi Partai Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula.

Sementara Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka menyata-

kan dana tak terduga memang harus dipasang. Menurut Puspaka, secara prinsip dana itu dialokasikan untuk mengantisipasi bencana sosial dan bencana alam, yang mungkin terjadi dalam kurun waktu tiga bulan kedepan.

Disebutkan, pada akhir tahun mendatang, Kabupaten Buleleng biasanya dilanda berbagai macam bencana. Sehingga pemerintah pun mengajukan dana tak terduga cukup besar. "Itu antisipasi karena akhir tahun biasanya banyak bencana. Tidak ada menutup belanja sebelumnya. Desember biasanya kan ada banyak bencana," kata Puspaka.

Dalam pembahasan kemarin juga terungkap, pendapatan daerah naik sebesar Rp 92,05 miliar, dari sebelumnya pada APBD Induk sebesar Rp 2,1 triliun menjadi sebesar Rp 2,24 triliun. Sedangkan belanja daerah naik sebesar Rp 123 miliar dari sebelumnya sebesar Rp 2,14 triliun lebih menjadi Rp 2,26 triliun. Sementara pembiayaan daerah dirancang defisit sebesar Rp 31,1 miliar. **k19**

Edisi : Jumat 8 Sept 2017

Hal : 4



# Terserap Rp 1,7 Triliun

## KUR Denpasar

Pelaku usaha kecil diminta urus legalitas UKM agar bisa mendapatkan KUR UMKM dengan besaran Rp 25 juta.

DENPASAR, NusaBali

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Denpasar menyebutkan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelontorkan perbankan di Kota Denpasar tahun 2017 ini sudah mencapai Rp 1,7 triliun. Meski serapan dana KUR yang didominasi oleh pelaku UMKM cukup tinggi, namun diprediksi masih banyak pelaku UKM belum memanfaatkan dana KUR karena tidak memiliki izin UKM sebagai syarat legalitas.

Data UMKM di Denpasar berdasarkan laporan Diskop UMKM Kota Denpasar mencapai 30.764 UKM. "Denpasar telah menyerap dana KUR tahun 2017



RAPAT koordinasi pembentukan tim monitoring evaluasi penyalur kredit KUR, di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (7/9).

mencapai Rp 1,7 triliun, dari Rp 4 triliun yang dijatahkan untuk Bali," kata Kepala Diskop UMKM Kota Denpasar Made Erwin Suryadarma Sena, usai rapat koordinasi pembentukan tim monitoring evaluasi penyalur kredit KUR, di Kantor Walikota Denpasar, Kamis (7/9).

Erwin mengungkapkan, besaran angka penyaluran KUR tahun 2017 ini mendapat apresiasi dari pihak perbankan. "Berdasarkan data dari BI (Bank Indonesia), angka NPL (Non Performing Loan) atau angka kredit macet dana KUR di Kota Denpasar yang sudah disalurkan sebesar 0,52 persen,

Edisi : Jumat, 8 September 2017

Hal : 11

artinya NPLnya cukup rendah, dari batas yang ditetapkan BI yaitu NPL di bawah 5 persen," ucap mantan Kabag Humas dan Protokol Kota Denpasar ini.

Namun, pria asli Buleleng ini meyakini masih banyak pelaku UKM kategori usaha mikro memiliki keinginan besar untuk memanfaatkan dana ini. Seperti tawaran dana KUR kategori UKM sebesar Rp 25 juta ke bawah, bisa mengajukan kredit tanpa jaminan, hanya saja harus memiliki legalitas yaitu izin UKM. "Seperti pedagang canang, warung kelontong, dan sebagainya bisa mendapatkan dana KUR maksimal Rp 25 juta tanpa jaminan, asalkan memiliki izin UKM," sebutnya.

Pihaknya mendorong pelaku UKM agar segera mengurus izin UKM di Kantor Kecamatan secara gratis, dan dilengkapi dengan persyaratan di antaranya ber-KTP Denpasar. "Apabila sudah memiliki izin, nanti ada tim yang akan turun melakukan survei kelayakan untuk mendapatkan dana KUR ini," bebarnya.

Erwin juga menambahkan, untuk mempercepat penyaluran

dana KUR ini, sekarang tengah dibentuk tim monitoring dan evaluasi penyaluran KUR yang melibatkan berbagai instansi seperti Disperindag, dinas koperasi, bank penyalur kredit, jamkrida untuk bersama-sama bergerak mempercepat penyaluran dana KUR ini kepada UKM-UKM di bawah. "Pada intinya, KUR disalurkan kepada warga dan tepat sasaran, sejauh ini beberapa kasus, banyak penyaluran dana KUR kurang optimal, jadi melalui intruksi Kementerian dalam negeri, agar membentuk tim monitoring dan evaluasi ini untuk mempercepat penyaluran kredit KUR dengan tepat sasaran," pungkasnya.

Untuk diketahui pemerintah pusat menyalurkan dana KUR melibatkan sejumlah perbankan nasional, di antaranya BRI, BNI, BPD dan sebagainya. Dana-dana yang disalurkan adalah dana dengan suku bunga kredit murah yaitu sebesar 9 persen per tahun. Dana KUR ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pelaku industri, perikanan, pertanian dan usaha kecil menengah lainnya. **cr63**

Edisi : Jumat 8 spt 2017

Hal : 11